



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NGAWI**



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25 );
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 135 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 61 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 61);
53. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

  
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 94

# KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang hanya karena perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Ngawi tahun 2024 dapat terselesaikan dan dapat dituliskan ke dalam bentuk buku.

Secara garis besar renja ini merupakan bentuk penjabaran dari pelbagai dokumen perencanaan seperti halnya RPJMD Kabupaten Ngawi dan Renstra. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan pencapaian visi, misi, sasaran maupun tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas. Melalui renja, semua perencanaan diukur dan dilakukan secara nyata di lapangan sehingga memudahkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasinya dari waktu ke waktu. Sehingga pada akhirnya dapat ditentukan telah sejauh mana visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi telah dicapai. Di samping renja menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas kegiatan dan penganggaran sebagaimana prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan renja ini tentu tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi maupun hasil koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu besar harapan kami dokumen renja ini dapat mewakili sekaligus dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan – kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka kontribusi kami mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ngawi di masa mendatang. Sekaligus menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian Rencana kerja ini kami susun dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar isi	.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1 Latar belakang	.....	1
1.2 Landasan hukum	.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	5
1.4 Sistematika	.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU</b>		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian renstra	.....	7
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Satpol PP	.....	21
2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP	.....	24
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	.....	28
2.5 Penelaahan usulan Program kegiatan Masyarakat	.....	43
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	.....	44
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	.....	44
3.2 Tujuan dan sasaran renja Satpol PP	.....	46
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	.....	61

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan di tahun 2024 baik Nasional, Propinsi Jatim dan Kabupaten Ngawi ada keserasian yaitu : “Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang di dukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah“

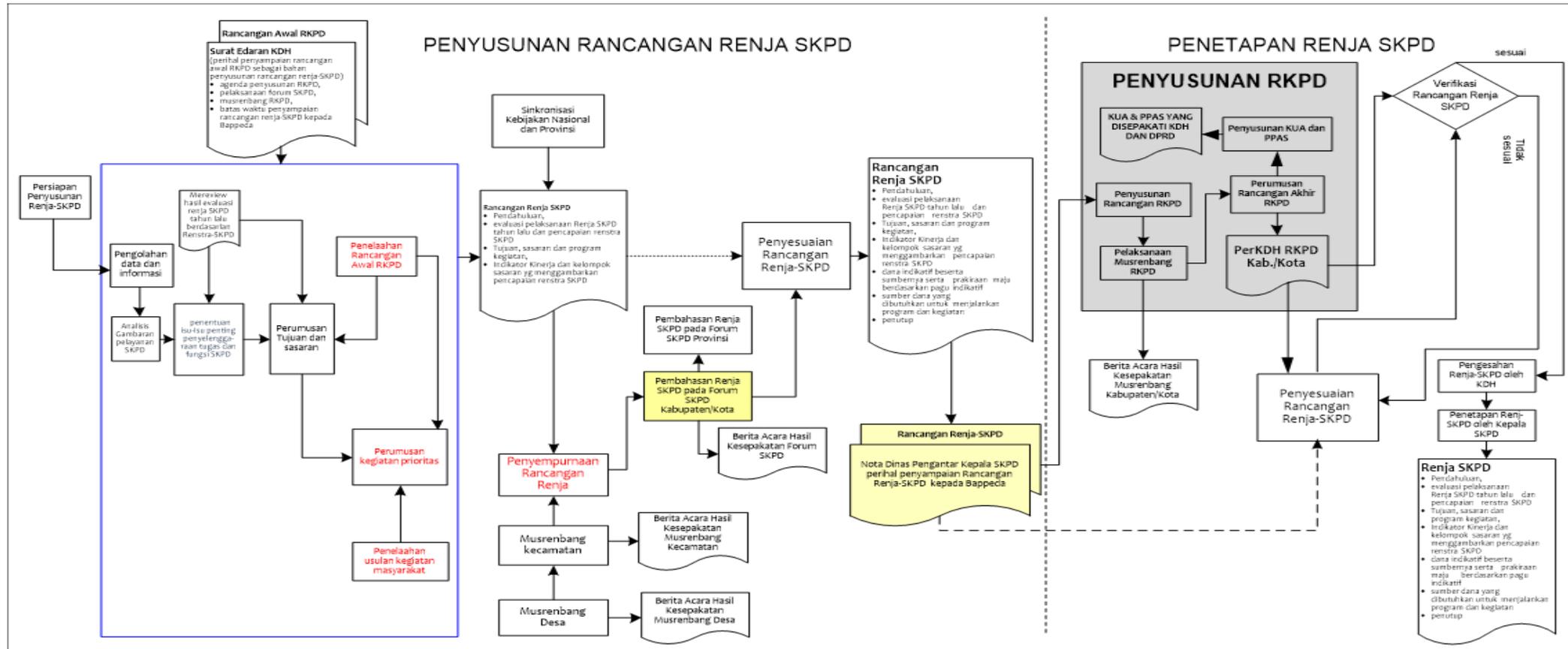
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Ngawi khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran, selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Perangkat Daerah yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pelayanan pemadam kebakaran, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ngawi maka sebagai salah satu Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tentu tidak terlepas dari dokumen – dokumen pendukungnya. Dokumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat tahunan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Ngawi beserta dokumen penyelarasannya serta tetap berpegang teguh pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 yang mengatur mengenai pelbagai tolok ukur pencapaian kinerja yang harus diraih oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Ngawi secara umum maupun lingkup Satuan Polisi Pamong Praja khususnya. Selanjutnya melalui penyusunan Renja ini akan menjadi pertimbangan sekaligus pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana kebijakan umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini nantinya ditetapkan bersama – sama oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Proses perumusan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dapat di lihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut :

### Bagan Penyusunan Rencana Kerja



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja mendasar pada peraturan – peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- b. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Permendagri 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender ( Lembar Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1)
- h. Perbup Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026
- j. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25)

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja sebagaimana diketahui merupakan penjabaran dari pelbagai dokumen perencanaan jangka panjang maupun menengah yang dituangkan ke dalam kegiatan – kegiatan dan penganggaran selama 1 (satu) tahun mendatang. Dengan demikian maksud penyusunan renja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Sebagai gambaran/deskripsi/penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah;
- b. memuat rencana program/kegiatan beserta tugas dan sasaran yang hendak dicapai dan perkiraan penganggaran untuk kegiatan–kegiatan dimaksud selama 1 tahun;
- c. merupakan acuan untuk satu kesamaan pemahaman dan bahasa bagi setiap kegiatan baik administratif maupun operasional sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan tindakan nyata dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi.

Adapun tujuan renja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. mendeskripsikan program–program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi;
- b. menentukan dan melakukan pengukuran terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka pencapaian visi dan misi organisasi

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sedangkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi pada tahun lalu tahun 2021 dan perkiraan capaian pada tahun berjalan tahun 2022 dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil kajian tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Ngawi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (outcome), Manfaat (benefit) dan Dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
2. Capaian Analisis Kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi sebesar RP. 15.863.658.614,00, yang terdiri dari 3 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.14,627,143,836 dengan capaian kinerja fisik sebesar 97,41% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,38 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023 untuk tahun berjalan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satpol PP Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Kemampuan Kreatifitas dan Pemahaman Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah.

2. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
3. Pengembangan kemitraan dengan Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supermasi hukum.
4. Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan untuk meningkatnya perlindungan terhadap kegiatan kehidupan masyarakat.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban serta upaya meminimalisir pelanggaran peraturan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi pada tahun lalu tahun 2021 dari 3 Program 12 kegiatan serta 29 sub kegiatan perkiraan capaian pada tahun berjalan(tahun2022)selengkapnyasebagaiberikut:

Tabel 2.1

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022 KABUPATEN NGAWI

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI

Kode	Urusan/Bid. Urusaan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) / kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2022	
					Target Renja tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	05 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9	3
			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9	3
1	05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-						
			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6	3
1	5 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2345 kali	2345 kali	2345 kali	2345 kali	100%	2345 kali	7035	3

						Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dok		26 Dok		26 Dok		26 Dok	100%	26 Dok	78	3		
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	100%	1	lap	3	3
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang di susun	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah laporan keuangan semesteran yang di susun	2	lap	2	lap	2	lap	2	lap	100%	2	lap	6	3
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun													
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakian dinas dan atribut yang dibeli	399	m	399	m	399	m	399	m	100%	399	m	1197	3
						Jumlah sepatu satpol yang dibeli	133	pasang	133	pasang	133	pasang	133	pasang	100%	133	pasang	399	3
						Jumlah pakian dinas lapangan												0	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40	peserta								40	peserta	40	1
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek	100	peserta								100	peserta	100	1

1	5	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun											0		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	presentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	3
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase pemenuhan kebutuhan ATK	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	3
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah air isi ulang yang disediakan	10	galon	10	galon	10	galon	10	galon	100%	10	galon	30	3
						jumlah makanan yang disediakan	238	kotak	238	kotak	238	kotak	238	kotak	100%	238	kotak	714	3
						jumlah minuman yang disediakan	15	dus	15	dus	15	dus	15	dus	100%	15	dus	45	3
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak	1140	lembar	1140	lembar	1140	lembar	1140	lembar	100%	1140	lembar	3420	3
						jumlah barang yang digandakan	3036	lembar	3036	lembar	3036	lembar	3036	lembar	100%	3036	lembar	9108	3
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang disediakan	24	exsemp lar	24	exsem plar	24	exsemp lar	24	exsemp lar	100%	24	exsem plar	72	3
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang hadir	200	kali	100	kali	40	kali	40	kali	100%	200	kali	340	1,7
						jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang hadir	150	kali	50	kali	100	kali	100	kali	100%	150	kali	300	2

1	5	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun													
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli			0		0		0		0		0		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1	unit	0		0		0		1	unit	1	1	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang dibeli/diadakan	21	unit	0		14		0		0%	21		21	1
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dibeli	3	unit			9	unit	0		0%	3	unit	3	1
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang di beli													
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1		0		0		0			1		1	1
						Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	0		0		0		0			0		0	
1	5	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun												0	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet yang di bayar	24	rek	24	rek	24	rek	24	rek	100%	24	rek	72	3
						jumlah rek listrik yang di bayar	24	rek	24	rek	24	rek	24	rek	100%	24	rek	72	3

						Jumlah rek telepon yang dibayar	24	rek	24	rek	24	rek	24	rek	100%	24	rek	72	3
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat kebersihan yang dibeli	44	buah	25	buah	25	buah	25	buah	100%	55	buah	105	2,4
						jumlah bahan kebersihan yang dibeli	125	buah	100	buah	100	buah	100	buah	100%	174	buah	374	3
						jumlah pembayaran jasa kebersihan	36	kali	48	kali	48	kali	48	kali	100%	36	kali	132	3,7
						jumlah pembayaran jasa operator komputer	24	kali	-	kali	12	kali	12	kali	100%	24	kali	36	1,5
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran honor	60	kali	60	kali	60	kali	60	kali	100%	60	kali	180	3
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun													
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan dinas/operasioanal yang di bayar pajaknya	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	3
						jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasioanal	5	kali	5	kali	5	kali	5	kali	100%	5	kali	15	3
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dibayar pajaknya	10	unit	10	unit	10	unit	10	unit	100%	10	unit	30	3

						jumlah pemeliharaan kendaraan dinas oprasional/lapangan	14	kali	14	kali	14	kali	14	kali	100%	14	kali	42	3
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan kerja dan mesin lainnya	30	kali	30	kali	30	kali	30	kali	100%	30	kali	90	3
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	320	m	320	m	320	m	320	m	100%	320	m	960	3
1	05	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti</b>	17 %		0		17 %		17 %		100%	17 %		34	2
						<b>Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</b>	11,05 %		0		11,05 %		11,1 %		100%	11,1 %		22,1	2
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18)	75 %		0		75 %		75 %		100%	75 %		150	2
						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 )	100 %		0		100 %		100 %		100%	100 %		200	2
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di susun	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun	1	desa	1	desa	1	desa	1	desa	100%	1	desa	3	3

						Jumlah Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas	2	lap	2	lap	2	lap	2	lap	100%	2	lap	6	3
						Jumlah Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum	1	lap	1	lap	1	lap	1	lap	100%	1	lap	3	3
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pembinaan dan penyuluhan	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah Patroli	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah Pengamanan dalam 1 tahun	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah Pengawasan	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan pencegahan dan penanganan unjuk rasa dalam satu tahun	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3

1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi kelinmasan yang dilaksanakan dengan Desa	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Ka. Satgas yang mengikuti sosialisasi kelinmasan	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan yang di adakan dalam pencegahan Trantibum di desa / kelurahan dan kebencanaan	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak	Jumlah anggota satpol pp dan yg telah mengikuti peningkatan SDM	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3
						Jumlah anggota linmas yang dibina keahlian dan keterampilannya	12	lap	12	lap	12	lap	12	lap	100%	12	lap	36	3

1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama dengan lembaga lain	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	3	3
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan perkada yang di tegakkan	15 perda	15 perda	15 perda	15 perda	100%	15 perda	45	3
						Jumlah laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36	3
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36	3
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36	3
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36	3

1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan PPNS	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36	3
						Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	12	3
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapat Peningkatan Kapasitas	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	12	3
1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota</b>	15 %	15 %	15 %	15 %	100%	15 %	45	3
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ( PMDN 18 )	15 %	15 %	15 %	15 %	100%	15 %	45	3
						Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	1 %	1 %	1 %	1 %	100%	1 %	3	3
						Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 )	5 %	5 %	5 %	5 %	100%	5 %	15	3
						Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	100%	15 menit	45	3
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 lap	0	12	12	100%	12	24	2
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	50 kali	45	50	50	100%	50	145	2,9

						Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RISPK	1 dok	0	0	1		1	2	2
						Jumlah Personil PMK yang di rekrut	9 orang	0	0	0		9	9	1
						Jumlah aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	6 orang	0	6	6	100%	6	12	2
						Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran bagaimana dimaksud	6 orang	0	0	0		6 orang	6	1
						Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	18 orang	0	18 orang	18 orang	100%	18 orang	36	2
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah pengadaan tanah dan bangunan	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!
						Jumlah Sapras yang PMK di beli	1 unit	0	0	0		1 unit	1	1
						Jumlah pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1 unit	0	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2	2
						Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	0	0		0	0	
						Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	2 unit	0	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4	2
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran	38 bangunan	0	38 bangunan	38 bangunan	100%	38 bangunan	76	2

1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasaran Proteksi Kebakaran	Jumlah kecamatan yang didata proteksi dan inspeksi kebakaran	19 kec	0	19 kec	19 kec	100%	19 kec	38	2
						Jumlah org yang mendapatn Sosialisasi pendataan sarpras proteksi kebakaran	40 orang	0	40 orang	40 orang	100%	40 orang	80	2
						Jumlah personil PMK yang mengikuti diklat inspektur pemadam	1 orang	0	0	0		1 orang	1	1
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang di adakan	24 kali	24 kali	2 kali	2 kali	100%	24 kali	50	2,08
						Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1 tim	0	0	0		1 tim	1	1
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan dan sosialisasi	300 org	250 org	50 org	50 org	100%	300 org	600	2
						Jumlah Redkar yang di bentuk	1 tim					1 tim	1	1
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan ops pencarian dan pertolongan yang disusun	12 lap	0	0	0		12 lap	12	1
						Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	240 kali	0	0	0		240 kali	240	1
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	jumlah tim rescue yang di bentuk	1 tim	0	0	0		1 tim	1	1
						Jumlah ops pencarian dan pertolongan yang tertangani	12 lap	0	0	0		12 lap	12	1

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat Membawahi :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang membawahi;
  - a. Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.
4. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang membawahi;
  - a. Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  - b. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
  - c. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - a. Seksi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman Kebakaran; dan
  - c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

Ada beberapa kendala yang masih dihadapi dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Internal

1. Masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Ngawi;
  2. Masih kurangnya Petunjuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi terkait;
  3. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang komprehensif yaitu alat-alat pendukung operasi-operasi di lapangan yang masih kurang memadai;
  4. Minimnya skill tentang manajemen konflik para personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi, sehingga perlu adanya pelatihan- pelatihan/diklat (Diklat sar Pola 150 Jam) untuk menunjang profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi.
2. Faktor Eksternal
1. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngawi yang relatif tinggi, yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan pemenuhan ekonomi lewat kerja dan usaha. Seiring dengan hal tersebut ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah pedagang kaki lima (PKL);
  2. Posisi Kabupaten Nagwi yang strategis menarik bagi para pelaku usaha dari daerah lain (tetangga), terutama pelaku usaha sektor informal namun tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap perda dan trantib yang berlaku di Kabupaten Ngawi, sehingga sering terjadi pelanggaran;
  3. Dukungan anggaran dan personil untuk pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan trantib serta pemadam kebakaran yang masih kurang;

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada capaian pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN NGAWI**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			81,87	82,76	83,89	84,56	80.81	81.75	83,89	84,56	
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum			50%	55%	60%	65%	48%	48%	100%	100%	
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			25%	30%	35%	40%	38%	21.42%	100%	100%	
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%					100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%					75%	100%	100%	100%	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%					38%	50%	25%	25%	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		15 menit					23,83 menit	21.25 menit	15 menit	15 menit	
8	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%										belum terlaksana
9	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45						50%	100%	100%	100%	

## 2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN

### POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran sebagai lembaga Pengamanan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaran pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan Kondisi geografis wilayah Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 19 kecamatan 217 desa/kelurahan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun, Kab Magetan, Kab Bojonegoro dan Kab.Sragen yang berdampak terhadap munculnya masalah-masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kantrantibmas di wilayah Kabupaten Ngawi mulai dari penyakit masyarakat seperti Perjudian, Miras dan PSK, masalah sosial lain yang dilatar belakangi oleh ekonomi seperti banyaknya pedagang kaki lima, banyaknya reklame tanpa ijin, dan penanganan pemadaman kebakaran belum sesuai dengan standar respon time. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat kedalam posisi yang cukup penting sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Satuan daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib terkait dengan berbagai gambaran kondisi diatas maka diperlukan suatu komitmen dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidanngnya masinng-masing berdasarkan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan budaya dan kearifan local setempat. Namun secara garis besar beberapa permasalahan yang menjadi

isue penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga ketertiban umum yang menyebabkan tingginya gangguan ketertiban umum.;
2. Masih kurangnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum secara komperhensif.
3. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
4. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

1. Aspek regulasi, yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan baik tingkat Kabupaten maupun kecamatan.
2. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.
3. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT sebagai berikut :

#### *1. Strength Factors*

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran yang meliputi :

- Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
- Legalitas berdasarkan Perda Nomor 17 tahun 2017
- Adanya kewenangan fungsi Dalam Penertiban.
- Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.

## 2. *Weakness Factors*

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran yang meliputi :

- Kurangnya Kuantitas Anggota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - DAMKAR
- Kurangnya profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi;
- Kurangnya Sarana & Prasarana serta kelengkapan pendukung
- Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi
- Kurangnya dukungan teknologi informasi
- Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada

## 3. *Opportunities Factors*

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi :

- Dinamika perkembangan produk hukum daerah
- Dukungan aturan perundang-undangan di bidang perencanaan yang menyatu dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- Meningkatnya partisipasi/kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum
- Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Ngawi

## 4. *Threats Factors*

Merupakan Tantangan yang harus di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran yang meliputi:

- Lemahnya koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi
- Terbatasnya dukungan dana yang tersedia
- Rancunya peraturan perundang-undangan di Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran yang harus dipedomani

- Rendahnya dukungan SDM aparaturnya yang sasarannya meliputi pelatihan (Lalatsat Kesamaptaannya, penanggulangan huru hara PPNS, serta Pemadam Kebakaran )

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat dirumuskan strategi berdasarkan urutan prioritasnya yaitu:

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya tenaga Penyidik dan tenaga lapangan
2. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi Pelaksanaan Penertiban.
3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi yang terkait
4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Peningkatan sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung
6. Peningkatan Kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran
7. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja-Pemadam Kabakaran dalam satu tahun satu tahun kedepan yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran khususnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), latsar, penanggulangan huru hara serta bela diri.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program Penertiban guna mendukung pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan secara professional dan transparan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara professional
4. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
5. Peningkatan Sarana Prasarana dan kelengkapan anggota guna mendukung kinerja pengamanan ketertiban umum serta kebijakan kebijakan pemerintah.
6. Peningkatan kebersamaan dalam segala hal sebagai upaya mencapai visi bersama dalam memenuhi tugas dan panggilan.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Melakukan review atau telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu 1 tahun mendatang merupakan hal yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja ini. Hal tersebut disebabkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2024. sehingga dalam pelaksanaannya harus berjalan secara sinkron. Adapun review disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.4  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN NGAWI

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	10.656.088.026,29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ngawi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	9.576.969.511,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	21.900.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	19.390.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ngawi	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dokumen	5.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ngawi	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dokumen	17.000.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.180.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0 dokumen		
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.180.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0 dokumen		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.270.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen		

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	3.270.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Ngawi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen		
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ngawi	Jumlah Laporan evaluasi kinerja	7 laporan	5.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ngawi	Jumlah Laporan evaluasi kinerja	7 laporan	2.390.000,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	9.202.607.026,29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	8.857.617.511,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104 org/tahun	9.188.607.026,29	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ngawi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104 org/tahun	8.847.617.511,00	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 dokumen	5.000.000,00	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	10.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ngawi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 laporan	5.000.000,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	215.433.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	46.500.000,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ngawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ngawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	46.500.000,00	

1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 org	45.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 org	-
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	70.433.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ngawi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 org	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	238.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ngawi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	221.624.000,00
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ngawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	7.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ngawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.595.000,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ngawi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	71.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ngawi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	62.109.000,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	6.099.757,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.950.000,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	31.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.860.000,00
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	7.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.230.000,00
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.880.000,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	110.900.243,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	100%	247.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai	100%	40.146.000,00

1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	25.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0 unit		
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	25.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ngawi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit		
1.5.3	Pengadaan Mebel	Ngawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit lemari arsip	20.000.000,00	Pengadaan Mebel	Ngawi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit lemari arsip		
1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit komputer	47.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit komputer	40.146.000,00	
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ngawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	30.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ngawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		
1.5.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit pagar	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit pagar		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	368.038.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ngawi	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	207.472.000,00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	148.614.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	91.052.000,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 lap	120.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 lap	42.960.000,00	

1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	99.424.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 lap	73.460.000,00	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	362.110.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	184.220.000,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.915.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.000.000,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	264.145.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	124.500.000,00	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	30.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	17.720.000,00	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	25.250.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.000.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ngawi	Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti	23%	2.860.071.022,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ngawi	Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti	23%	1.488.200.000,00	
		Ngawi	Prosentase desa yang aman dari gangguan trantibum linmas	100%			Ngawi	Prosentase desa yang aman dari gangguan trantibum linmas	100%		

		Ngawi	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%			Ngawi	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%		
		Ngawi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%			Ngawi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ngawi	Prosentase Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disusun	100%	2.123.871.022,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ngawi	Prosentase Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di	100%	752.000.000,00	
		Ngawi	Prosentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun	87%			Ngawi	Prosentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun	87%		
		Ngawi	Prosentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	30%			Ngawi	Prosentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	30%		
		Ngawi	Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol	100%			Ngawi	Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol	100%		
		Ngawi	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas	100%			Ngawi	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas	100%		
		Ngawi	Prosentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum	100%			Ngawi	Prosentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum	100%		

2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ngawi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	84 kasus	1.379.056.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ngawi	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	84 kasus	469.198.000,00	
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ngawi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 kasus	5.692.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Ngawi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	0 kasus		
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 dokumen	30.600.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 dokumen	36.000.000,00	
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ngawi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	282.523.022,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ngawi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 dokumen		
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Ngawi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 org	180.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk	Ngawi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	150 org	242.842.000,00	

2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	91.000.000,00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	3.960.000,00	
2.1.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit	145.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 unit		
2.1.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ngawi	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	6 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ngawi	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0 dokumen		
2.1.9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	5.000.000,00	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0 laporan		
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ngawi	Persentase Perda dan perkara yang di tegakkan	100%	706.200.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ngawi	Persentase Perda dan perkara yang di tegakkan	100%	706.200.000,00	
		Ngawi	Persentase laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan	100%			Ngawi	Persentase laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan	100%		

2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	48 laporan	100.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	48 laporan	100.000.000,00	
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	200.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	200.000.000,00	
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Ngawi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	<b>406.200.000,00</b>	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Ngawi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	<b>406.200.000,00</b>	
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Ngawi	Persentase Pembinaan PPNS	100%	30.000.000,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Ngawi	Persentase Pembinaan PPNS	100%	30.000.000,00	
		Ngawi	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100%			Ngawi	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100%		

2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 laporan	30.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 laporan	30.000.000,00	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Ngawi	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota</b>	35%	2.000.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Ngawi	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota</b>	35%	409.999.510	
		Ngawi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ( PMDN 18 )	20%			Ngawi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	20%		
		Ngawi	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	10%			Ngawi	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	10%		
		Ngawi	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan				Ngawi	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan			
		Ngawi	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				Ngawi	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ngawi	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.325.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Ngawi	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	100%	274.203.760	

			Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 )	25%				Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 )	25%		
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit		
3.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 laporan	550.000.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 laporan	195.549.000,00	
3.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	22 unit	375.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	22 unit	42.351.760,00	
3.1.3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Ngawi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 org	200.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Ngawi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	20 org	32.347.000,00	

3.1.4	pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran,penyelamatan (SKIK)	Ngawi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	10 desa	100.000.000,00	pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran,penyelamatan (SKIK)	Ngawi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	10 desa	3.956.000,00	
3.1.5	penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan pengulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.	Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 dokumen	100.000.000,00	penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan pengulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.	Ngawi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 dokumen		
3.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Ngawi	Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran	100%	125.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Ngawi	Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran	100%	21.000.000	
3.2.1	Pendataan Sarana Prasaran Proteksi Kebakaran	Ngawi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	125.000.000,00	Pendataan Sarana Prasaran Proteksi Kebakaran	Ngawi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem	1 dokumen	21.000.000,00	

3.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Ngawi	Persentase pelatihan dan sosialisasi yang di laksanakan	100%	300.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Ngawi	Persentase pelatihan dan sosialisasi yang di laksanakan	100%	69.795.750,00	
		Ngawi	Persentase relawan pemadam kebakaran yang Kompeten	100%			Ngawi	Persentase relawan pemadam kebakaran yang Kompeten	100%		
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Ngawi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 org	150.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi	Ngawi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah	100 org	69.795.750,00	
3.3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Ngawi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10 desa	150.000.000,00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Ngawi	Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 desa		
3.4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Ngawi	Persentase Laporan ops pencarian dan pertolongan	100%	250.000.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Ngawi	Persentase Laporan ops pencarian dan pertolongan	100%	45.000.000,00	

		Ngawi	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	100%			Ngawi	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	100%		
3.4.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 laporan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 laporan	45.000.000,00	
3.4.2	pengadaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	14 unit	100.000.000,00	pengadaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Ngawi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai	0 unit		
3.4.3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	5 laporan	50.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang	0 laporan		

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat tidak ada usulan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh perangkat daerah se Kabupaten Ngawi yang keterkaitan dengan peningkatan gangguan keamanan dan trantibum dan perlindungan masyarakat,serta pemadam kebakaran.

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 2.5					
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN NGAWI					
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI					
No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>NIHIL</b>					

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2024, sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 itu sendiri merupakan pembangunan Jangka menengah, dengan melihat pencapaian kerja dari tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas Pembangunan nasional

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terkait dengan Visi Misi Kabupaten Ngawi Program kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja telah mendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing SDM Melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan perekonomian daerah melalui nilai tambah pertanian
3. Penurunan Tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Pemantapan Infrastruktur wilayah guna kemudahan peningkatan nilai tambah pertanian
5. Pemantapan tata kelola Pemerintahan dan Peningkatkan kepuasan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi yang optimal

Sedangkan arah kebijakan pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten di Tahun 2024 sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN		
Nasional	Propinsi	Kabupaten
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak	Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Melalui Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Yang Didukung Oleh Pemantapan Infrastruktur Wilayah

Sebagai upaya keselarasan dan sinergi dalam upaya pembangunan daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu:

#### SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Misi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 disusun untuk memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi periode 2021-2026. Adapun misi pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Melalui Kemudahan Terhadap Akses Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Mengembangkan Perekonomian Kerakyatan Melalui Kemudahan Investasi, Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Didukung Riset Dan Teknologi.
3. Meningkatkan Etos Kerja Dan Integritas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan Prima.
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Guna Percepatan Pembangunan Yang Berkesinambungan.
5. Meningkatkan Kondusifitas Daerah Melalui Pengembangan Budaya Lokal Yang Berlandaskan Keagamaan Dan Gotong Royong.

Dapat di lihat bahwa arah kebijakan pembangunan secara Nasional, Propinsi dan Kabupaten ada keserasian, maka Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam satu tahun mendatang harus mendukung prioritas pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, Rancana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Kerja Satuan Polisi pamong Praja dalam kurun waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum secara komperhensif
- b. Meningkatkan kualitas SDM, serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- c. Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika yang berkembang di era masyarakat global.
- d. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang aman, tertib dan kondusif
- e. Meningkatkan ketaatan masyarakat kepada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran
- c. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menyelenggarakan tibumtranmas
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengendali ketentraman dan ketertiban umum
- e. Meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- g. Meningkatkan profesionalisme dalam penegakan perda.
- h. Meningkatkan pengethuan,pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satpol PP Kabupaten Ngawi program dan kegiatan dalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2021	2026
1	2	3	4	5	10
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,87	85,79
2	Meningkatnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum secara komperhensif		Tingkat penyelesaian K3(ketertiban, ketentraman dan keindahan	100%	100%
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	50%	75%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	25%	50%

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGAKAT DAERAH

Dalam bab ini faktor faktor yang menjadi pertimbangan rumusan program kegiatan mendasar adanya Visi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi : “Semesta berencana Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri,berakhlaq,makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan;
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Satuan Polisi Pamong Praja mauk dalam misi ke-5 yaitu Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong dengan mempunyai Tujuan “ Menguatkan nilai nilai demokrasi berlandaskan keagamaan dan budaya lokal” dan tujuan Rencana Strategis Menurunnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentramandan keindahan) dan sasaran Rencana Strategis meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Tujuan Renstra itulah yang menjadi rumusan program kegiatan agar tercapai Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, maka program dan kegiatan yang dirancang Satpol PP Kabupaten Ngawi tahun 2024 terdiri dari 3 Program 13 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Tabel rencana Program /kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																	
Kab. Ngawi																	
Tahun 2024																	
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
														15.690.547.330,01			
1														15.690.547.330,01			
1	05													15.690.547.330,01			
1	05	01												10.746.293.330,01			
1	05	01	2.01											27.169.000,00			
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	9 Dokumen	100%	17.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	6.584.500,00
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	100%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000,00
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	100%	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	7 Laporan	100%	2.390.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6.584.500,00



						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Paket	100%	62.109.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.500.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Paket	100%	7.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Paket	100%	12.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	31.500.000,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Dokumen	100%	4.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.500.000,00
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	100%	2.880.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	100%	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined	1 Unit	2 unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined	1 Unit	2 unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined	1 Unit	2 unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	38.038.234,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined	2 Unit	2 unit	40.146.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	38.000.000,00
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													



					Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.500.000,00		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								1.488.200.000,00					2.944.254.000,00	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								752.000.000,00					2.208.054.000,00	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Prosentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Prosentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Prosentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang disusun Prosentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	10 Dokumen	100 % 100 % 87 % 100 % 100 % 40 %	36.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	30.910.000,00		
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Prosentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Prosentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Prosentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang disusun Prosentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	4 Dokumen	100 % 100 % 87 % 100 % 100 % 40 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	550.000.000,00		
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														

						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Persentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Persentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Persentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat yang disusun Persentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentruman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	150 Orang	100 % 100 % 87 % 100 % 100 % 40 %	242.842.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	182.000.000,00
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentruman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Persentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Persentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Persentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat yang disusun Persentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentruman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	4 Dokumen	100 % 100 % 87 % 100 % 100 % 40 %	3.960.000,00	PENDAPATAN TRANSFER		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	92.000.000,00
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Persentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Persentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Persentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat yang disusun Persentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentruman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	6 Dokumen	100 % 100 % 87 % 100 % 100 % 40 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	6 Dokumen	0,00



					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Presentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Presentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Presentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang disusun Presentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	1 Laporan	100 % 100 % 87 % 100 % 100 % 40 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5.000.000,00
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum											
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 )	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota Linmas Persentase laporan pelatihan peningkatan SDM Satpol PP Presentase desa yang melaksanakan rekrutmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun Presentase Laporan Kerjasama antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum Presentase laporan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang disusun Presentase Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 12,90 % 23 % 80 %	1 Unit	100 % 100 % 87 % 100 % 40 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	52.000.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							706.200.000,00				706.200.000,00
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
					Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Presentase Perda dan perkada yang di tegakkan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 % 19 % 80 % 12,90 %	48 Laporan	100 % 100 %	100.000.000,00	Pajak Rokok	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 Laporan	100.000.000,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
					Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 ) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18 ) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Persentase laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Presentase Perda dan perkada yang di tegakkan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 % 19 % 80 % 12,90 %	12 Laporan	100 % 100 %	406.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Rokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	406.200.000,00

1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ( PMDN 17 &18 ) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase laporan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan Prosentase Perda dan perkada yang di tegakkan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 % 19 % 80 % 12,90 %	24 Laporan	100 % 100 %	200.000.000,00	Pajak Rokok	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 Laporan	200.000.000,00		
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								30.000.000,00				30.000.000,00		
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (PMDN 17&18) Persentase Laporan Hasil pencegahan Trantibum yang di Tindak Lanjuti Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan( PMDN 17 &18 )	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Prosentase Pembinaan PPNS	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 100 % 12,90 % 19 %	4 Laporan	100 %	30.000.000,00	Pajak Rokok	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	30.000.000,00		
1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>												409.999.510,00		2.000.000.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												274.203.760,00		1.325.000.000,00
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ( PMDN 18 ) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 ) Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 menit 20 % 35 % 10 % 2 %	12 Laporan	25 % 100 % 15 %	195.549.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	550.000.000,00		
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ( PMDN 18 ) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 ) Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 menit 20 % 35 % 10 % 2 %	20 Orang	25 % 100 % 15 %	32.347.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	200.000.000,00		
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														

					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ( PMDN 18 ) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 ) Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 menit 20 % 35 % 10 % 2 %	10 Desa/Kelurahan	25 % 100 % 15 %	3.956.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	10 Desa/Kelurahan	100.000.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 menit 20 % 35 % 10 % 2 %	22 Unit	25 % 100 % 15 %	42.351.760,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	22 Unit	375.000.000,00
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Prosentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 menit 20 % 35 % 10 % 2 %	5 Dokumen	25 % 100 % 15 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	100.000.000,00
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							21.000.000,00				125.000.000,00
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 2 % 15 menit 35 % 10 %	1 Dokumen	100 %	21.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	125.000.000,00



						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ( PMDN 18 ) Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan ( PMDN 17 ) Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota Prosentase Laporan ops pencarian dan pertolongan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 menit 10 menit 2 menit 15 menit 35 menit	14 Unit	100 % 100 %	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	14 Unit	100.000.000,00
<b>TOTAL</b>												<b>11.475.169.021,00</b>	<b>15.690.547.330,01</b>				

## BAB V PENUTUP

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi tahun 2024 maka Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki arah yang jelas dan merupakan perencanaan selama 1 (satu) tahun ke depan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ngawi. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu selama tahun 2024 tercermin dari pelbagai indikator yang disertakan. Dalam penyusunan Renja sasaran yang akan dicapai disesuaikan dengan memperhatikan permasalahan di Kabupaten Ngawi maupun isu – isu strategis yang ada. Renja yang telah disusun diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta menjadi pedoman pelaksanaan rencana pencapaian kinerja serta mampu sebagai tolok ukur keberhasilan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 akan berjalan dan berhasil baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi para pihak terkait yang berkepentingan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja bersifat makro dan mendukung pencapaian target serta sasaran dan visi misi Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renja ini maka diperlukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian segenap aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rancana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rencana kerja ini ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat
- c. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat
- d. Pengevaluasian, pengakajian hasil pengukuran pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten ngawi dan jika diperlukan dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama – sama untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Amien

